

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Krisis yang sedang melanda masyarakat dan bangsa Indonesia dewasa ini berawal dari krisis moneter yang berkepanjangan, kemudian menjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintah.

Krisis tersebut menunjukkan dua hal pokok dalam tatanan kehidupan bangsa kita, yaitu (1) fundamental ekonomi yang lemah, sehingga sangat rentan terhadap gejolak yang mengglobal terhadap perekonomian bangsa (2) ketidakberdayaan pemerintah untuk mengatasi berbagai krisis yang terjadi dewasa ini.

Ketidakberdayaan tersebut tampak dalam aspek kehidupan politik, ekonomi, hukum, pendidikan dan aspek-aspek yang lainnya. Agenda reformasi terus dilaksanakan untuk memperbaiki sendi-sendi kehidupan dan kekuatan dengan menetapkan skala prioritas tertentu. Akan tetapi proses reformasi belum berjalan secara komprehensif, baru berjalan pada tahap mencari siapa yang salah dan siapa yang reformis.

Dari kenyataan tersebut, kekuatan reformasi diawali atau berasal dari kelompok sumber daya manusia yang mempunyai visi, misi, transparansi dan berkualitas sehingga dapat direalisasikan dalam pembaharuan menuju tatanan kehidupan yang baru.

Lebih jelasnya bahwa sumber daya manusia yang berkualitas merupakan aset nasional yang menjadikan penentu utama dan pertama dalam pencapaian tujuan pembangunan kehidupan bangsa.

Peranan Pendidikan merupakan salah satu bagian dari pembangunan dengan tujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan dan kesejahteraan bangsa. Dalam rangka menghadapi perubahan-perubahan besar era reformasi dan proses globalisasi serta pasar bebas tentu akan mempengaruhi dan berpengaruh terhadap kehidupan bangsa secara menyeluruh.

Untuk menghadapi hal tersebut maka kita memerlukan suatu visi, misi dan rencana pendidikan yang lebih terarah dan strategis untuk dapat meningkatkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas dari yang sudah ada saat ini . Dalam rangka penyusunan visi dan rencana strategi pendidikan nasional perlu diperhatikan suatu pemahaman permasalahan pendidikan dari semua jenjang dan tingkatan.

Dalam penyusunan program dan strategi pencapaian visi dan misi, harus diawali dengan kajian berbagai permasalahan dari semua komponen yang terlibat dalam peningkatan mutu pendidikan yaitu dengan memperhatikan faktor kekuatan, peluang, hambatan dan ancaman (analisa SWOT). Sehingga hasil dari pengkajian tersebut diharapkan dapat menemukan berbagai alternatif kebijakan yang tepat berdasarkan kebutuhan, yang meliputi empat aspek yaitu :

- (1) Program strategis dari setiap komponen pendidikan
- (2) Sumber daya manusia yang tersedia
- (3) Manajemen serta

(4) Sarana dan prasarana yang menunjang.

Salah satu penentu keberhasilan pembangunan, pada tempatnya adalah kualifikasi SDM perlu ditingkatkan melalui program pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan secara sistematis dan terarah berdasarkan kepada kepentingan yang selalu mengacu kepada kemajuan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi.

Dari pernyataan tersebut ada dua hal yang sangat penting yang perlu dilaksanakan secara simultan, yaitu memperbaiki sistem pendidikan dan meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan profesional.

Secara gamblang pernyataan tersebut di jelaskan dalam GBHN (1998-1999) bahwa: "Pendidikan Nasional perlu ditata, dikembangkan dan dimanfaatkan secara terpadu dan serasi, baik antar berbagai jalur, jenis dan jenjang pendidikan maupun antar sektor dengan sektor pembangunan lainnya". Implikasi tersebut mewujudkan suatu proses penataan pendidikan yang berorientasi kepada kualitas dan tuntutan dunia kerja yang diharapkan oleh "Stokeholder" maupun "Costomer".

Suatu proses penataan pendidikan yang optimal akan diimplementasikan melalui empat strategi dasar yang mencakup: (1) pemerataan, (2) relevansi, (3) kualitas dan (4) efisiensi.

Untuk kepentingan perencanaan pendidikan yang diterapkan dalam konteks perencanaan sekolah menurut Djam'an Satori (1999: 11-13) mencakup :

1. Perumusan isi dan tujuan pengembangan sekolah analisis pihak-pihak yang berkepentingan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi guru-guru dan kepala sekolah serta aspirasi murid, orang tua masyarakat dan pemerintah.
2. Merefleksikan aspirasi para stakeholder.
3. Perumusan bidang hasil pokok (perluasan dan pemerataan mutu, relevansi, efektivitas dan efisiensi pengelolaan) perlu diartikulasikan sebagai rumusan-rumusan yang khas untuk lembaga sekolah.
4. Analisis posisi (internal dan eksternal sekolah) pengendalian dan umpan balik untuk meningkatkan efektifitas pencapaian sasaran dan mengkaji aspek efisiensinya.

Pernyataan tersebut memberikan gambaran bahwa suatu perencanaan yang baik harus dilakukan dengan memperhatikan berbagai unsur yang terkait. Demikian pula halnya dengan perencanaan pendidikan akan berhasil dengan baik apabila dapat memberikan kepuasan terhadap pengguna/ pemakai jasa pendidikan. Hal tersebut dapat berlangsung dan berjalan di semua jalur dan jenjang pendidikan yang mencakup: (1) Pendidikan dasar; (2) Pendidikan menengah dan; (3) Pendidikan tinggi.

Beinayme Semiawan (1989: 5) mengatakan bahwa pendidikan dewasa ini mengalami empat masalah kemunduran antara lain:

1. Secara kualitatif tidak sesuai dengan tugas anak muda untuk mempersiapkan kehidupannya pada usia dewasa.
2. Kekurangan dana dalam memenuhi tekanan dan tuntutan masyarakat.
3. Kekurangan kapasitas penyebaran, pemilihan spesialis guru dan perlengkapan untuk memperbaiki tingkah laku.
4. Mengalami kesulitan dalam mengatasi nilai-nilai tradisional yang turun temurun.

Dari persoalan tersebut, selanjutnya Ace Suryadi (1993:109) mengatakan bahwa kekhawatiran akan penurunan kualitas pendidikan dasar terus berlangsung tanpa ada jawaban yang jelas dan secara konseptual dapat dibenarkan.

Secara umum misi pendidikan dasar adalah penjabaran dari misi yang dituangkan dalam sistim pendidikan nasional sedangkan dalam U.U.No.2/1989, paling tidak dapat diidentifikasi menjadi tiga fungsi mendasar yaitu;

- (1) Mencerdaskan kehidupan bangsa;
- (2) Mempersiapkan lulusan yang memiliki kemampuan membaca, menulis menghitung; dan
- (3) Mempersiapkan untuk mengikuti pendidikan lanjutan.

Dalam jangka pendek, upaya untuk memulihkan kembali pendidikan nasional dari dampak moneter dan krisis ekonomi, dalam mengatasi permasalahan pendidikan yang dihadapi saat ini dan meletakkan dasar-dasar reformasi pendidikan secara terarah, sistematis, bertahap dan berkelanjutan dalam terbentuknya masyarakat madani Rumusan hasil Rakernas Depdikbud (1999/2000).

Selanjutnya H. A. R. TILAAAR (1999:167) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan dalam masyarakat madani ialah “suatu proses pendidikan yang mengakui akan hak-hak serta kewajiban perorangan di dalam masyarakat”.

Implikasi dari pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa pendidikan secara nasional tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah akan tetapi merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, yaitu pendidikan yang dilaksanakan dari, oleh dan bersama-sama masyarakat.

Yang dimaksud dengan pendidikan dari masyarakat yaitu pendidikan yang mampu memberikan jawaban kepada kebutuhan (needs) dari masyarakat itu sendiri, dan yang dimaksud dengan pendidikan oleh masyarakat yaitu masyarakat bukan merupakan objek pendidikan untuk melaksanakan kemauan pemerintah tetapi merupakan partisipasi yang aktif dari masyarakat, sedangkan yang dimaksud pendidikan bersama-sama masyarakat adalah masyarakat diikutsertakan dalam program-program pemerintah yang telah mendapatkan persetujuan.

Dengan adanya paradigma baru dalam kehidupan masyarakat termasuk dunia pendidikan dewasa ini, maka diperlukan reposisi dan relevansi karena pendidikan dewasa ini belum menunjang terhadap jiwa reformasi yang menginginkan masyarakat demokrasi dan keterbukaan dalam segala aspek terutama bidang pendidikan.

Lebih lanjut dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2/1989, pasal 27 dijelaskan bahwa tugas, ruang lingkup, wewenang dan sebutan tenaga kependidikan antara lain:

1. Tenaga kependidikan bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola, dan atau memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan.
2. Tenaga kependidikan meliputi tenaga pendidikan, pengelolaan satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti dan pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar.
3. Tenaga pengajar merupakan tenaga pendidik yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar, yang pada jenjang pendidikan dasar dan menengah disebut guru dan pada jenjang pendidikan tinggi disebut dosen.

Pengelolaan pendidikan dasar terutama sekolah dasar yang merupakan satu paket kebijakan pemerintah dan salah satu agenda yang menjadi perhatian serius adalah meningkatkan profesionalisme dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan mutu serta relevansi pendidikan, terutama peningkatan guru yang dilaksanakan secara formal melalui kegiatan penyetaraan D-2 dan penataran-penataran guru pemandu mata pelajaran.

Sedangkan program peningkatan mutu pendidikan di sekolah dasar dapat tercapai apabila salah satu dari komponen pendidikan dapat dilaksanakan dengan baik yaitu, kegiatan belajar mengajar di dalam kelas berlangsung sesuai dengan tuntutan bahwa tugas guru tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan melainkan memberikan pengajaran dan pendidikan dengan baik, sehingga terjadi komunikasi antar siswa dan guru yang dapat menghasilkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan dan harapan kurikulum serta keinginan dari masyarakat.

Hal tersebut dapat tercapai apabila guru yang mengajar di dalam kelas mampu dan dapat meningkatkan kemampuannya melalui berbagai kegiatan, diantaranya pertemuan/tatap muka yang dilakukan secara berkala, diskusi, bantuan/bimbingan teman sejawat (guru pemandu) serta pembinaan yang dilakukan oleh kepala sekolah, pengawas sekolah dan para pembina pendidikan lainnya.

Tidak kalah penting dari proses KBM adalah peranan kepala sekolah yang berfungsi sebagai manajerial, tanggung jawab dalam pembagian tugas dan pendelegasian wewenang, serta mampu menciptakan "team work" yang kuat dan kokoh untuk mengupayakan terwujudnya disiplin kerja dan memberikan



penghargaan serta sanksi kepada tenaga kependidikan (guru) yang berprestasi dan disiplin. Peranan kepala sekolah dalam memberikan dorongan dan motivasi akan menghasilkan guru yang profesional, yaitu guru yang mampu menjadi arsitek dalam mengembangkan profesinya sendiri dan mampu menjawab pertanyaan tentang tugas-tugas yang harus dihadapinya serta dapat memilih pengalaman-pengalaman secara profesional dan dapat mengorganisasikannya secara bermakna. Guru yang bersikap profesional akan terbuka terhadap adanya pembaharuan, mau menanggapi dan menghargai pendapat orang lain, mau mencobakan gagasan positif yang berasal dari sesama guru tidak mudah putus asa, memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan tugas sehari-hari, memiliki rasa percaya diri dan mau bekerjasama diantara rekan guru.

Sejalan dengan pernyataan tersebut, Frymier (1991:14) mengemukakan bahwa profil nyata dalam kegiatan sehari-hari, seorang guru yang profesional dilukiskan sebagai berikut:

1. Memiliki motivasi dan kemauan untuk memperbaiki proses belajar secara terus-menerus;
2. Komitmen dengan keputusan yang telah diambil dan bertanggung jawab atas hasil yang dicapai, jika gagal mereka akan belajar dari pengalaman tersebut;
3. Berani mendiskusikan kegiatannya dengan para supervisor dan mengundang supervisor mengunjungi kelas untuk mengevaluasi dirinya;
4. Memandang belajar sebagai kegiatan yang berlangsung sepanjang hidup dan memberikan ide-ide dan pemikiran baru untuk mengembangkan pendidikan di sekolahnya;
5. Selalu mendiskusikan kesulitan pelaksanaan tugasnya dengan teman sejawat dan bersedia untuk diobservasi oleh teman-temannya
6. Menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan menganggap murid sebagai mitra dalam PBM;
7. Mendorong murid untuk menjadi mandiri dan mampu belajar secara mandiri

Guru yang memiliki karakteristik di atas dapat disebut sebagai guru yang profesional dan sangat dibutuhkan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan sekolah dasar. Pada kenyataan kondisi sekarang umumnya guru sudah kehilangan komitmen terhadap profesinya, hal ini banyak faktor yang mempengaruhi terhadap jabatan guru antara lain:

1. Sistem pendidikan yang sifatnya sentralistik,

Kondisi tersebut dapat mempengaruhi terhadap pengembangan kemampuan guru yang selalu mendapatkan komando dari pihak atasannya serta target kurikulum yang harus dicapai, sehingga guru merasa puas dengan apa yang dimilikinya karena tidak ada satu tantangan untuk selalu belajar dan berlatih dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin jauh meninggalkan kemampuan guru terutama guru sekolah dasar.

2. Kondisi mayoritas guru sekolah dasar masih ada yang memiliki kualifikasi pendidikan SPG, D2 dan hanya sebagian yang sudah memiliki pendidikan S1.

Perubahan dan perkembangan jaman seiring dengan lahirnya kebijakan-kebijakan serta adanya paradigma baru dalam dunia pendidikan menuntut tenaga-tenaga kependidikan khususnya guru yang mampu mengembangkan diri, selalu mau menerima informasi baru serta mengikuti kemajuan dan perkembangan teknologi yang mempengaruhi terhadap perubahan kehidupan masyarakat, sehingga diperlukan guru dan kepala sekolah yang berkualitas dan profesional, sebagai manajer pendidikan di sekolah.



Sebaiknya bila tenaga kependidikan (guru) minimal harus memiliki latar belakang pendidikan D2, maka kepala sekolah minimal harus berpendidikan setara S1, sedangkan untuk pengawas apabila memungkinkan berkualifikasi S2 serta memiliki keahlian yang khusus dalam bidang pengawasan dan pengajaran.

Hal tersebut harus diupayakan dengan cara meningkatkan kemampuan SDM dalam evaluasi kinerja serta peningkatan kualifikasi perangkat kemampuan dasar guru melalui berbagai pembinaan yang dilakukan dalam kegiatan-kegiatan pelatihan baik individual maupun kelompok yang diselenggarakan dalam kegiatan gugus sekolah.

Upaya untuk mewujudkan kemampuan dan meningkatkan kualitas sekolah merupakan tanggung jawab bersama di kalangan tenaga kependidikan, antara pengawas, kepala sekolah dan guru perlu dikembangkan secara terprogram dan terarah secara terus-menerus melalui suatu sistem pembinaan yang dapat meningkatkan kualitas kerja serta mutu pendidikan.

Sistem Pembinaan Profesional (SPP) yang bersipat pelatihan dan penataran serta bimbingan yang bersifat tatap muka diharapkan mampu meningkatkan, mendorong tenaga kependidikan gemar belajar, dan senantiasa mengembangkan diri untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, maupun sikap, sehingga memberikan dampak yang positif dalam melaksanakan KBM. Pada akhirnya prestasi belajar anak akan lebih baik sehingga mutu pendidikan dapat tercapai.

Pengetahuan, keterampilan, kreativitas, kemandirian, etos kerja, minat belajar, komitmen, dan motivasi kerja guru perlu ditingkatkan serta perlu

penyegaran melalui sistem pembinaan profesional (SPP), dengan harapan setiap guru dapat menguasai ilmu pengetahuan, keterampilan serta memiliki kemampuan profesional yang mampu berperan sebagai manager, proses belajar mengajar berani membuat suatu keputusan serta dapat mengembangkan kreatifitasnya untuk meningkatkan kemampuannya dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan khususnya pendidikan di sekolah dasar.

Satu batasan yang dikeluarkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1994/1995: 5) bahwa pembinaan profesional adalah usaha memberi bantuan pada guru untuk memperluas pengetahuan, meningkatkan keterampilan mengajar dan menumbuhkan sikap profesional sehingga guru menjadi lebih ahli mengelola KBM dalam membelajarkan anak didik.

Sistem pembinaan profesional bagi guru dilaksanakan dengan tujuan yang jelas, dalam lingkup yang terjangkau serta melalui mekanisme dalam tatanan yang teratur. Tujuan pemberian bantuan profesional adalah agar kualitas guru bertambah baik, dalam arti dapat tumbuh dan berkembang dalam aspek pengetahuan, keterampilan, serta wawasan kependidikan secara lebih luas.

Dalam pelaksanaan pembinaan profesional guru tidak dapat dilaksanakan secara tersendiri, tetapi harus dilaksanakan secara terpadu yang melibatkan berbagai unsur terkait dengan kegiatan tersebut.

Untuk merealisasikan tujuan tersebut perlu diatur dalam suatu ikatan yang jelas dan komitmen, maka perlu diadakan satu batasan dalam lingkup gugus sekolah yang cukup rasional untuk membentuk suatu ikatan serta komitmen

dengan memperluas kerjasama antara beberapa sekolah dalam lingkup wilayah yang sama.

Gugus sekolah dasar sebagai suatu organisasi berdasarkan Keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan menengah Depdikbud. No.079/C/Kep/1/93 “gugus sekolah dasar adalah sekelompok atau gabungan dari 3-8 sekolah kurang lebih meliputi antara 40-60 orang guru dan kepala sekolah” yang memiliki maksud bersama dalam meningkatkan mutu pendidikan dalam wadah KKG, KKKS, dan KKPS melalui pembinaan profesional. Berbagai macam kegiatan yang bersifat bantuan profesional kepada guru terjadi dalam lingkup gugus. Kegiatan yang dimaksud adalah berpusat pada salah satu anggota gugus yang disebut dengan SD INTI, yaitu suatu wadah Pusat Kegiatan Guru (PKG). Kedudukan PKG pada SD INTI ialah untuk mengisi suatu komitmen bersama melalui kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas profesional guru. Sedangkan sekolah dasar yang tergabung dalam wadah gugus selain SD INTI disebut sebagai SD IMBAS, semua sekolah dasar yang tergabung dalam gugus melaksanakan suatu komitmen untuk maju bersama, meningkatkan kualitas pendidikan sekolah dasar dalam kegiatan gugus, sehingga terjalin rasa kebersamaan, sepenanggungan, keserasian dan kesamaan cita terhadap profesi keguruan.

Kemampuan profesional tenaga kependidikan, Depdikbud (1988:3) memberikan batasan sebagai berikut:

1. Guru memiliki kemampuan profesional dalam tugas kegiatan belajar mengajar
2. Kepala Sekolah Dasar memiliki kemampuan profesional dalam melakukan manajemen sekolah dan supervisi kelas

3. Pengawas memiliki kemampuan profesional dalam tugas pembinaan serta pengawasan sekolah.

Guru, kepala sekolah dan pengawas adalah merupakan suatu sistem yang satu sama lain tidak bisa terlepas dan tergabung dalam kegiatan gugus. Gugus merupakan salah satu wadah untuk berbagai kegiatan dan aktifitas yang berada di lingkungan sekolah berupa kegiatan KKG, KKKS dan KKPS. Sedangkan yang dimaksud dengan PKG adalah pusat kegiatan guru yang berada pada sekolah dasar inti berfungsi sebagai sanggar kerja guru dan juga dapat digunakan sebagai workshop. Sebagai sanggar kegiatan PKG harus dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang dibutuhkan antara lain: ruang perpustakaan, ruang kerja/ praktek dan ruang pertemuan. Semua contoh hasil kerja guru dan kepala sekolah melalui KKG dan KKKS terdapat di PKG, sehingga PKG berfungsi sebagai bengkel kerja dan sanggar kegiatan, pusat sumber belajar bagi guru dalam meningkatkan profesinya. Bentuk Kelompok Kerja Guru (KKG), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), dan Kelompok Kerja Pengawas (KKPS), merupakan satu kelompok yang berdasarkan pada kepentingan pengisian kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab profesi masing-masing, tetapi tidak terlepas dari satu kesatuan yang utuh dalam sistem pembinaan profesi.

KKG berorientasi kepada peningkatan kualitas pengetahuan, penguasaan materi, teknik mengajar, interaksi guru dan siswa, metode mengajar, yang berfokus pada penciptaan kegiatan belajar mengajar yang aktif. KKKS berorientasi pada perbaikan manajemen atau pengelolaan sekolah dan peningkatan serta pengayaan kiat-kiat kepemimpinan. Karena pada dasarnya kualitas

pendidikan sebuah sekolah dasar tergantung pula pada warna manajemen dan gaya kepemimpinan kepala sekolah. KKPS berorientasi kepada perbaikan pelayanan pembinaan supervisi yang dapat meningkatkan kualitas profesional kepala sekolah dan guru. Untuk mewujudkan pelayanan pembinaan supervisi yang berkualitas, seyogyanya dilakukan pengelolaan tenaga kependidikan dengan prinsip-prinsip Manajemen Sumber Daya Manusia (“Human Resource Management”).

Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) adalah fungsi dan aktivitas yang ditandai dengan pengakuan pada pentingnya tenaga kerja sebagai SDM. Dengan demikian pada dasarnya KKG, KKKS, maupun KKPS semua kegiatan terpusat kepada upaya peningkatan kualitas profesi guru yang diharapkan akan berdampak positif pada peningkatan mutu pendidikan di sekolah dasar.

Lahirnya suatu kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah yang tertuang dalam PP No.28 tahun 1995, telah memberikan nuansa baru pada sistem persekolahan yang menuntut kemampuan mandiri dan peluang untuk mengembangkan “School based management”. Salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan dalam sektor pendidikan, ialah pemberdayaan gugus sekolah secara optimal melalui program Sistem Pembinaan Profesional (SPP) dalam forum PKG melalui kegiatan KKG, KKKS, KKPS. Kegiatan SPP tersebut menumbuhkan proses dialogis antar tenaga kependidikan di sekolah dasar yang sudah dilaksanakan sejak beberapa tahun ke belakang. Implementasi dari kebijakan tersebut disahkan dengan SK Dirjen Dikdasmen No.079/C/Kep/I/1993, tanggal 7 April 1993, dengan sasaran akhir pembinaan terhadap kualitas profesi

guru untuk menghadapi tugas-tugas ke depan yang selaras dengan berbagai tuntutan masyarakat antara lain:

- 1). Berkaitan dengan tugas pokok meliputi; Pembinaan yang berorientasi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Iman dan taqwa, perubahan sosial kemasyarakatan, pembaharuan dan pengembangan kurikulum yang diikuti ketersediaan fasilitas penunjang lainnya, biaya pendidikan, serta peningkatan kemampuan profesional pada setiap jenis profesi dan pekerjaan.
- 2). Perbaikan prestasi dan kelulusan siswa, meliputi: masih ditemukan sejumlah siswa yang mengulang, nilai mata pelajaran tertentu yang belum memadai serta para lulusan SD yang belum memiliki keterampilan baca tulis hitung.
- 3). Berkaitan dengan prasarana yang masih terbatas dalam menunjang proses belajar mengajar.

Pernyataan di atas memberikan implementasi bahwa pembinaan kemampuan profesional guru sangat diperlukan terutama dalam penguasaan kurikulum, materi setiap mata pelajaran, metode dan teknik evaluasi, komitmen guru terhadap tugas dan disiplin dalam artian yang luas.

## **B. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian**

Dari pernyataan latar belakang masalah tersebut maka dapat dikemukakan bahwa pembinaan profesional adalah usaha memberi bantuan pada guru untuk memperluas pengetahuan, meningkatkan keterampilan mengajar dan menumbuhkan sikap profesional sehingga guru menjadi lebih ahli mengelola KBM dalam membelajarkan anak didik (Depdikbud: 1994/1995).

Pembinaan profesional guru dalam konteks peningkatan mutu pendidikan sekolah dasar merupakan salah satu alternatif yang dipilih untuk meningkatkan kualitas yang meliputi kemampuan, pengetahuan, wawasan, keterampilan, kreatifitas, komitmen, pengabdian serta disiplin guru sekolah dasar, yang

diarahkan kepada sasaran utama yaitu peningkatan kemampuan kerja guru dan penataan profesi guru.

Perlu dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan komitmen guru terhadap tugas adalah komitmen dalam pelaksanaan tugas selaku guru harus didukung oleh suatu perasaan bangga akan “tugas” yang dipercayakan kepadanya Depdikbud (1995/1996).

Dari pernyataan tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa seorang guru harus bangga terhadap tugasnya dalam rangka mempersiapkan masa depan anak didiknya sebagai generasi penerus bangsa. Betapapun jenis ragam tantangan dan rintangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas, guru harus tetap tegar dan penuh kesadaran bahwa tugasnya harus dilaksanakan dengan penuh rasa pengabdian serta memberi kesempatan sebesar-besarnya dan seluas-luasnya kepada anak didik untuk melakukan kegiatan serta mengembangkan pengalaman belajarnya. Perlu disadari pula bahwa tugas seorang guru terikat oleh ruang, tempat dan waktu, oleh karena itu perlu diusahakan pembinaan secara berkala agar pada diri setiap guru tumbuh subur rasa pengabdian dan tanggungjawab, karena profesi sebagai guru adalah jabatan kunci dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, disamping itu guru yang mencintai terhadap tugasnya selalu bersikap ingin terus belajar untuk meningkatkan diri baik pengetahuan maupun keterampilan mengajar, sehingga akan menjadi guru yang profesional dalam rangka peningkatan KBM yang efektif dan pada akhirnya akan menghasilkan lulusan yang bermutu. Pembinaan profesional guru sebagai suatu sistem di dalamnya terdapat beberapa komponen yang satu sama lainnya

mempunyai peranan dan jalinan erat, sehingga apabila ada satu atau beberapa komponen yang tidak berperan sesuai dengan fungsinya maka sistem itu sendiri tidak akan berjalan dengan baik.

Komponen-komponen yang terkait dalam Sistem Pembinaan Profesional (SPP) adalah:

1. Ketenagaan: pembina, pengawas, kepala SD, guru, guru pemandu mata pelajaran.
2. Perangkat Gugus Sekolah: SD Inti, SD Imbas, PKG, KKG, KKKS, dan KKPS.
3. Program: Penataran, diskusi, seminar, tutorial pokok-pokok masalah, kebutuhan riil dan praktis dalam proses belajar-mengajar, jadwal dan pelaksanaan program.
4. Manajemen: organisasi, struktur kepengurusan, mekanisme kerja, disiplin, komunikasi, motivasi, pencatatan dan pelaporan.
5. Dana: sumber-sumber penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan.
6. Pemantauan dan evaluasi: pemantauan rutin, penampungan masalah dan keluhan, tes hasil belajar.

Dari uraian tersebut di atas memberikan salah satu pilihan terhadap pengembangan pembinaan kemampuan profesional guru yang berlandaskan kepada pemikiran bahwa pendidikan yang berkualitas harus ditangani oleh para pengelola pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang bermutu serta siswa yang berkualitas sebagai output sekolah dasar yang merupakan hasil didikan dan pembelajaran dari guru-guru yang berkualitas pula. Kemampuan dan kecakapan

guru mendidik dan mengajar tidak akan berkembang bila hanya mengandalkan pengalaman. Pengalaman kadang-kadang terlalu rutin dan monoton, bahkan kurang memupuk potensi-potensi kreativitas dan aktifitas yang semula ada, apabila tidak mendapat latihan-latihan atau penyegaran kurang merangsang untuk tumbuh dan berkembang dalam pelaksanaan tugasnya. Potensi-potensi yang ada harus terus dipupuk dan dirangsang, didorong serta dilengkapi dengan pengetahuan-pengetahuan baru agar dapat menumbuhkan sikap profesi yang makin matang, sikap ingin mencoba ingin belajar dan ingin maju terus serta sikap ingin selalu mengadakan inovasi dan mencoba berkreasi. Ini semua diharapkan dapat terwadahi dalam wadah pembinaan profesional, dimana forum teman sejawat akan menambah gairah untuk maju bersama serta berkompetitif.

Oleh karena itu program pembinaan kemampuan profesional guru yang efektif dan efisien sangat diperlukan mengingat konteks permasalahan gugus sekolah dasar memiliki ruang lingkup yang sangat luas.

Bertitik tolak dari latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan maka pada kesempatan ini penulis akan mengangkat pokok penelitian dengan rumusan sebagai berikut: **“Bagaimana efektifitas pembinaan profesional guru melalui kegiatan gugus sekolah dasar yang dilaksanakan di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sukasari Kota Bandung”**.

Dari pokok masalah tersebut maka fokus penelitian diarahkan kepada: (1) pengelolaan gugus untuk memberdayakan guru, (2) efektifitas peningkatan semangat belajar guru, (3) faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Pembinaan kemampuan profesional guru dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan sekolah dasar untuk menumbuhkan semangat belajar guru dalam kelembagaan gugus.

Untuk menjawab permasalahan tersebut maka diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana profil kelembagaan gugus 03 sekolah dasar yang ada di Kecamatan Sukasari Kota Bandung?
  - a. Bagaimanakah struktur organisasi gugus 03?
  - b. Bagaimanakah perencanaan program gugus 03?
  - c. Bagaimanakah pelaksanaan program gugus 03?
  - d. Bagaimanakah pengawasan program gugus 03?
2. Bagaimanakah kegiatan pembinaan kemampuan profesional guru yang dilaksanakan oleh para pembina?
  - a. Kegiatan pembinaan yang diberikan oleh pengawas?
  - b. Kegiatan pembinaan yang diberikan kepala sekolah?
  - c. Kegiatan pembinaan yang diberikan pemandu mata pelajaran?
3. Aspek-aspek apa sajakah yang dibina, yang diberikan kepada guru?
4. Bagaimanakah prosedur pembinaan yang diberikan kepada guru?
5. Bagaimana efektivitas hasil pembinaan guru terhadap KBM?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Bertitik tolak pada permasalahan yang diuraikan pada halaman sebelumnya, secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana

pembinaan profesional guru yang dilaksanakan pada gugus sekolah dasar dapat memberikan kontribusi terhadap keberhasilan program peningkatan mutu pendidikan dasar dan kondisi-kondisi yang mempengaruhinya. Sedangkan secara penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan dan pengelolaan kelembagaan gugus 03 yang mendukung terhadap perkembangan potensi yang telah dimiliki oleh guru-guru yang ada di gugus 03.
- b. Untuk mengetahui pola dan sasaran pembinaan kemampuan profesional guru yang dilakukan oleh para pembina di gugus 03
- c. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pengembangan budaya belajar guru baik secara individu maupun kelompok yang dilaksanakan pada gugus 03.
- d. Mengetahui efektivitas kerjasama antara pembina dengan masyarakat dan instansi terkait.
- e. Mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap pembinaan kemampuan profesional guru pada gugus 03.

Hasil pengkajian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perumusan konsepsi-konsepsi pembinaan profesional guru yang lebih berakar pada kondisi sosial budaya sesuai dengan kebutuhan daerah.

Berbagai faktor yang menjadi penghambat dan pendukung juga menjadi perhatian peneliti sehingga dapat menemukan suatu bentuk atau sistem pembinaan profesional yang berorientasi pada masalah kesulitan guru dalam proses belajar-mengajar.



Selain itu hasil penelitian ini dapat mengungkapkan pengelolaan kelembagaan gugus sekolah dasar di Kecamatan Sukasari Kota Bandung serta diharapkan dapat mengemukakan dampak dari hasil pembinaan kemampuan profesional guru dalam upaya peningkatan kualitas proses belajar mengajar yang efektif sebagai salah satu kunci keberhasilan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.

Penelitian ini bersifat analisis deskriptif, dengan harapan dapat memberikan gambaran tentang perilaku pembinaan kemampuan profesional guru secara lengkap dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaannya dengan memfungsikan gugus sekolah dasar sebagai pusat KKG, KKKS dan KKPS. Dalam era globalisasi pembinaan profesional guru hendaknya lebih mengacu pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, kreativitas, dan tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Guru selalu dihadapkan dengan kondisi yang situasional atau selalu berubah-ubah. Hal ini mengisyaratkan bahwa guru harus selalu siap menghadapi berbagai perubahan yang terjadi secara tepat dan kompleks. Di samping itu para pembina di tuntut kemampuannya yang tinggi untuk mengakomodasi berbagai informasi tentang perkembangan dunia pendidikan khususnya dan ilmu pengetahuan serta teknologi pada umumnya sebagai bahan baku untuk menyusun program pembinaan guru. Semua kegiatan terpusat kepada upaya peningkatan kualitas profesi guru yang diharapkan berdampak positif pada peningkatan kualitas pendidikan di sekolah dasar, maka manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua dimensi yaitu:

## 1. Dimensi teoretis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan konsep-konsep pembinaan profesional yang baru dan sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Dalam era globalisasi, menghadapi pasar bebas hendaknya pembinaan profesional guru lebih mengacu pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, kreativitas, dan tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.

Pembinaan profesional guru merupakan salah satu fungsi manajemen pendidikan, dengan sasarannya adalah peningkatan kemampuan mengajar dan penataan profesi guru. Pengembangan konsepsi pembinaan profesional guru lebih mengacu untuk pengembangan sistem bukan hanya pengembangan aspek instrumental.

Sistem yang ada hendaknya berorientasi pada konsep pemberdayaan guru, penumbuhan budaya belajar dan hubungan sekolah dengan masyarakat serta pihak-pihak yang terkait. Implikasi dari sistem pembinaan profesional guru adalah sistem manajemen sekolah yang bersifat kondisional.

Penyusunan pola pembinaan profesional guru disesuaikan dengan masalah dan kebutuhan guru, sehingga pembinaan tersebut tidak dapat dirancang di belakang meja dengan mengandalkan nalar dan rasio tetapi benar-benar berdasarkan kebutuhan di lapangan yang diperoleh dari hasil pengawasan para pembina (kepala sekolah dan pengawas). Pembinaan profesional guru identik dengan kegiatan “mengajar guru tentang bagaimana cara mengajar yang baik”. Hal ini mengandung makna bahwa pembina pendidikan adalah “gurunya para

guru". Mereka dituntut untuk memberikan keteladanan kepada guru dalam semua aspek kehidupan.

Penelitian ini juga dapat bermanfaat untuk pengembangan konseptual dengan mengacu pada kerangka teori-teori yang relevan sehingga pada gilirannya dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja gugus sekolah dasar.

Selanjutnya diharapkan mampu memberikan sumbangan dalam pengembangan gugus sebagai salah satu alternatif pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka peningkatan mutu guru dan kualitas sekolah dasar.

## **2. Dimensi praktis**

Penelitian ini mencoba mengungkapkan secara empirik atau naturalistik berbagai kendala dalam pelaksanaan pembinaan profesional guru dan gugus sekolah.

Pelaksanaan pembinaan guru melalui kegiatan gugus sekolah secara formal merupakan tugas pengawas. Namun karena jabatannya kepala sekolah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pembinaan profesional terhadap guru-guru di bawah binaannya dengan memfungsikan gugus melalui KKG, KKKS dan KKPS.

Hasil penelitian ini menjadi masukan bagi para pembuat kebijakan di tingkat manajerial untuk mengembangkan atau menyempurnakan pola pembinaan yang ada sehingga sesuai dengan kebutuhan guru, pengelola atau manajemen

gugus yang dibentuk dengan kepengurusan serta struktur organisasi dan mekanisme kerja yang sesuai dengan ketentuan.

Kontribusi lain dari penelitian ini adalah, dengan terungkapnya faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pembinaan profesional guru dapat dimanfaatkan sebagai petunjuk dalam mencari upaya-upaya praktis guna membantu mengatasi kesulitan dalam rangka pembinaan yang mengacu kepada profesi guru yang profesional.

Bertitik tolak dari hasil penelitian ini dapat merumuskan dan mengemukakan beberapa rekomendasi untuk mengatasi berbagai faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan profesional guru. Rekomendasi ini memberikan arah untuk menciptakan suatu sistem pembinaan yang lebih baik dalam menghadapi perkembangan dan perubahan zaman.

Melalui implementasi rekomendasi diharapkan dapat teratasi kendala-kendala dalam pelaksanaan pembinaan profesional guru melalui gugus sekolah dasar.

Hal ini secara tidak langsung akan mempengaruhi peningkatan efektifitas pembinaan guru dan kelembagaan gugus, sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan performen guru serta peningkatan mutu pendidikan khususnya di sekolah dasar.

#### **D. Anggapan Dasar**

Landasan teoritis yang bertitik tolak pada penelitian ini didasarkan pada pemikiran, bahwa pembinaan kemampuan profesional guru adalah upaya

peningkatan kualitas pendidikan dasar yang harus dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan yang dilakukan oleh semua bagian.

Hal tersebut sesuai dengan prinsip “Continuous Circle Improvement” dalam konsep Total Quality Management Manap Somantri (1999), sejalan dengan prinsip tersebut dikatakan pula oleh para pakar pendidikan yang mengemukakan bahwa pembinaan profesional guru tidak dapat dilaksanakan secara tersendiri, tetapi harus secara terpadu yang melibatkan berbagai unsur terkait dengan kegiatan tersebut.

Salah satu sistem pembinaan profesional yang di sampaikan oleh Achmad Sanusi, dkk (1991:58-59):

1. Pendidikan pra jabatan guru
2. Seleksi untuk memasuki profesi guru
3. Sertifikasi dan wewenang untuk mengajar
4. Pendidikan dalam jabatan guru
  - a. Pendidikan lanjutan yaitu program pendidikan bagi guru yang sedang bekerja untuk menyetarakan kualifikasi akademik dengan persyaratan minimal. Program pendidikan ini dilaksanakan oleh LPTK yang berwenang mengeluarkan sertifikasi kualifikasi.
  - b. Pelatihan penjenjangan yaitu program pendidikan dalam jabatan guru untuk meningkatkan jenjang karier guru, terutama untuk menduduki jabatan-jabatan kependidikan tertentu (kepala sekolah, penilik dan pengawas). Program pelatihan ini diselenggarakan oleh Pusdiklat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
  - c. Penataran kemampuan guru yaitu program pendidikan dalam jabatan guru yang ditujukan untuk meningkatkan dan menyesuaikan kemampuan teknis dan kemampuan profesionalnya.

Program penataran dilakukan melalui berbagai program yang mencakup:

- 1) Penataran peningkatan kemampuan teknis dan profesional untuk mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 2) Penataran penyegaran, yaitu untuk menyegarkan kemampuan guru yang telah berada dan bekerja diperkirakan kurang mendapat kesempatan untuk berhubungan dengan suasana mutakhir dunia pendidikan.

- 3) Penataran untuk menyampaikan berbagai informasi mengenai pembaharuan di bidang pendidikan
- 4) Penataran untuk menyampaikan berbagai kebijaksanaan baru dalam bidang pendidikan.

Sejalan dengan pemikiran tersebut dikemukakan pula oleh pendapat: Schuler (1987) tujuan utama pelatihan dan pengembangan karir, serta memberikan motivasi dalam rangka meningkatkan komitmen karyawan terhadap organisasi. Untuk menentukan tujuan khusus pelatihan dan pengembangan harus dilakukan langkah awal berupa penaksiran kebutuhan (“need assessment”).

Penilaian kebutuhan adalah diagnosa masalah sekarang dan tantangan masa depan yang harus diatasi oleh pelatihan dan pengembangan. Salah satu cara mengidentifikasi masalah sekarang adalah dengan memperhatikan deskripsi dan spesifikasi tugas/jabatan, serta hasil penilaian kinerja (work performance appraisal).

Implementasi dari pemikiran-pemikiran tersebut maka, pembinaan profesional guru yang dilaksanakan di gugus bertolak dari kebutuhan nyata di lapangan, dengan harapan agar guru:

1. Memiliki wawasan kependidikan yang lebih luas.
2. Memiliki pola pikir yang logis dan rasional terhadap usaha peningkatan mutu pendidikan.
3. Berkembang dalam pengetahuan dan teknologi kependidikan.
4. Mempunyai kemampuan dan keterampilan pengelolaan kegiatan belajar mengajar yang berkualitas.
5. Mampu menguasai materi pelajaran secara lebih luas dan mendalam

6. Memiliki nalar mengajar tentang penggunaan azas-azas didaktik dan metodik atau ilmu mengajar.
7. Menguasai teknik-teknik penilaian atas proses dan hasil belajar yang layak
8. Memiliki komitmen terhadap tugas dan disiplin dalam melaksanakan tugas.

#### **E. Paradigma Penelitian**

Pengertian paradigma secara sederhana dikatakan sebagai kerangka berpikir Moh.Surya (1997:18) mengartikan bahwa paradigma merupakan suatu kesatuan persepsi, gagasan, konsep dan nilai-nilai yang menentukan pola berpikir dan berperilaku manusia dalam waktu dan tempat tertentu.

Apabila dikaitkan dengan penelitian maka pengertian paradigma diartikan sebagai kerangka konseptual dalam melihat permasalahan secara terstruktur. Dalam hal ini paradigma merupakan pernyataan perspektif teoritis yang akan menggiring dan menjadi panduan dalam aktivitas inquiry, juga merupakan representasi, model suatu teori, ide atau prinsip.

Pernyataan tersebut dirangkum dari Lincoln dan Guba (1985:223), dan Carter Vood (1973:407) dalam Djam'an Satori (1989:27-29) sebagai berikut "Paradigm is a statement of theoretical perspective that will guide the inquiry and a representation, a model of theory, an idea, or a principle".

Bogdan dan Biklen (1982:32) dalam Lexy J. Maleong (2000) menyatakan bahwa paradigma adalah kumpulan longgar dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama, konsep atau proporsi yang mengarahkan cara berpikir dan kegiatan penelitian.

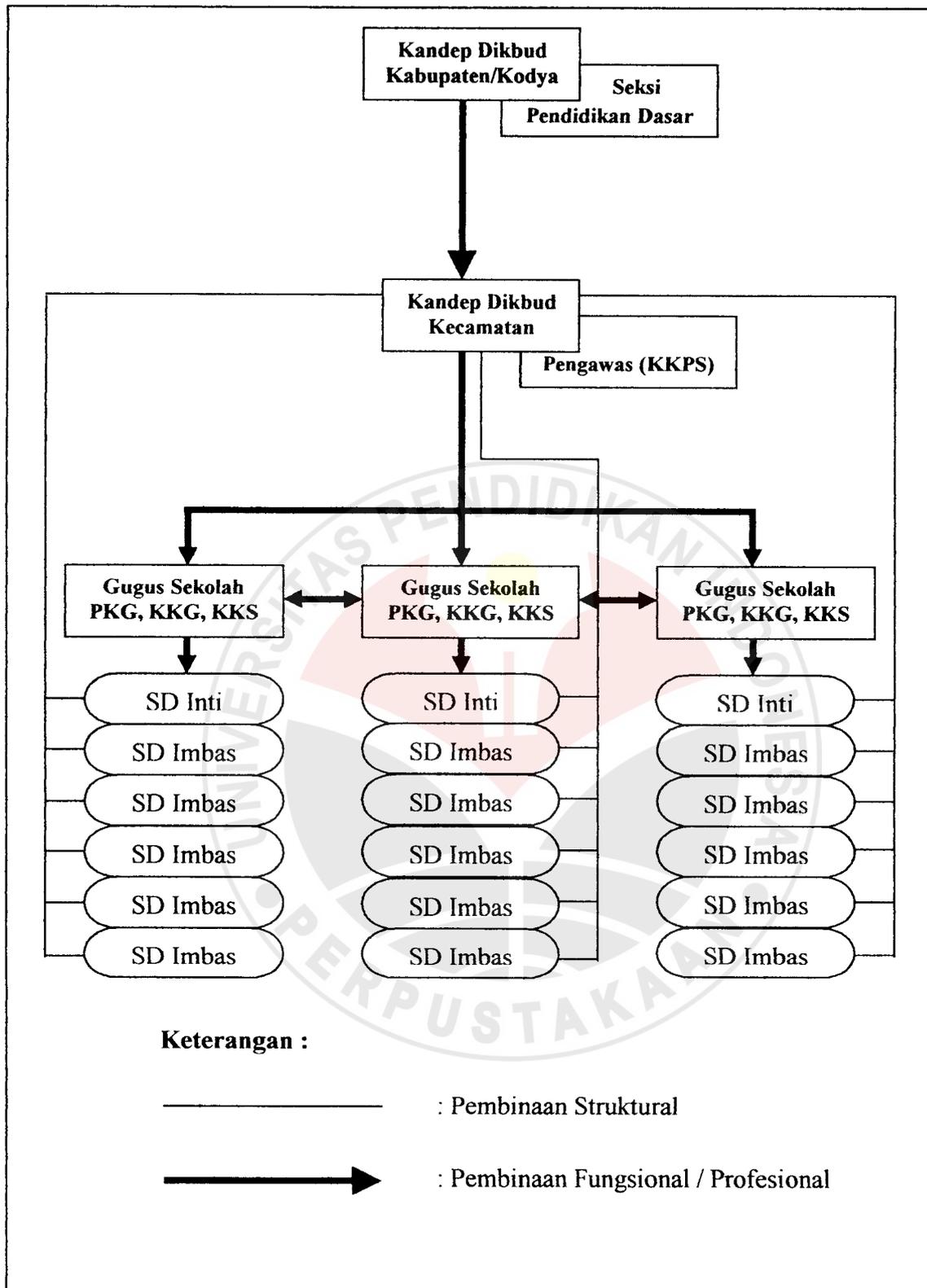
Jadi dapat disimpulkan, bahwa paradigma penelitian atau kerangka berpikir adalah suatu model yang dijadikan acuan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitiannya.

Sebelum menggambarkan kerangka berpikir yang merupakan pedoman untuk memahami penelitian, terlebih dahulu akan dikemukakan mekanisme pembinaan kemampuan profesional guru dalam sistem gugus Sekolah Dasar, sebagai salah satu organisasi fungsional, di dalamnya terdapat berbagai pihak yang turut menentukan keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Pihak-pihak itu meliputi: Departemen Pendidikan Nasional Kabupaten dan Kota, Kantor Departemen pendidikan Nasional tingkat Kecamatan, dan pengawas sekolah.

Menurut fungsi dan wewenangnya, pihak-pihak tersebut berperan aktif dalam menentukan keberhasilan program pengelolaan yang memberikan kontribusi terhadap kualitas kinerja guru dan prestasi siswa.

Kepala Kandep Diknas Kecamatan merupakan unsur pembina administratif, sedangkan pengawas sekolah sebagai pembina teknis merupakan tugas dan tanggungjawabnya terutama dalam pemberdayaan KKG dan KKS.

Selain para pembina tersebut di dalam KKG ada Guru Pemandu mata pelajaran yang bertugas untuk memandu rekan-rekannya yang mengalami kesulitan/ kendala pembelajaran dalam pelajaran tertentu. Untuk melihat lebih jelas tentang struktur dan mekanisme pembinaan kemampuan profesional guru sekolah dasar melalui kegiatan gugus akan digambarkan sebagaimana tertera pada halaman berikut.



**Gambar 1.**  
**Mekanisme Pembinaan Guru dalam Sistem Gugus**



Sistem pembinaan profesional guru melalui kegiatan gugus merupakan salah satu kegiatan yang harus mendapatkan perhatian secara khusus untuk dilaksanakan secara efektif. Perkembangan kemajuan pengetahuan dan teknologi semakin pesat telah masuk ke dalam organisasi sekolah yang mengharuskan seluruh tenaga kependidikan untuk meningkatkan kemampuannya secara profesional.

Pengelolaan gugus sekolah dasar dimulai dari:

1. Pengelolaan sistem pendidikan nasional atas kebijakan nasional berkenaan dengan sistem pengembangan profesional tenaga kependidikan pada setiap cabang ilmu pengetahuan.
2. Pengelola satuan pendidikan bertanggungjawab untuk memberikan kesempatan kepada tenaga kependidikan dalam mengembangkan kemampuan profesional masing-masing baik melalui paket kebijakan pemerintah maupun kebijakan internal dan mandiri.
3. Percepatan arus pembaharuan pendidikan yang dibawa oleh guru dilakukan melalui kegiatan pembelajaran yang efektif.
4. Pertumbuhan budaya inovatif dan kreatif dapat diwujudkan melalui wadah yang terorganisir dengan baik.

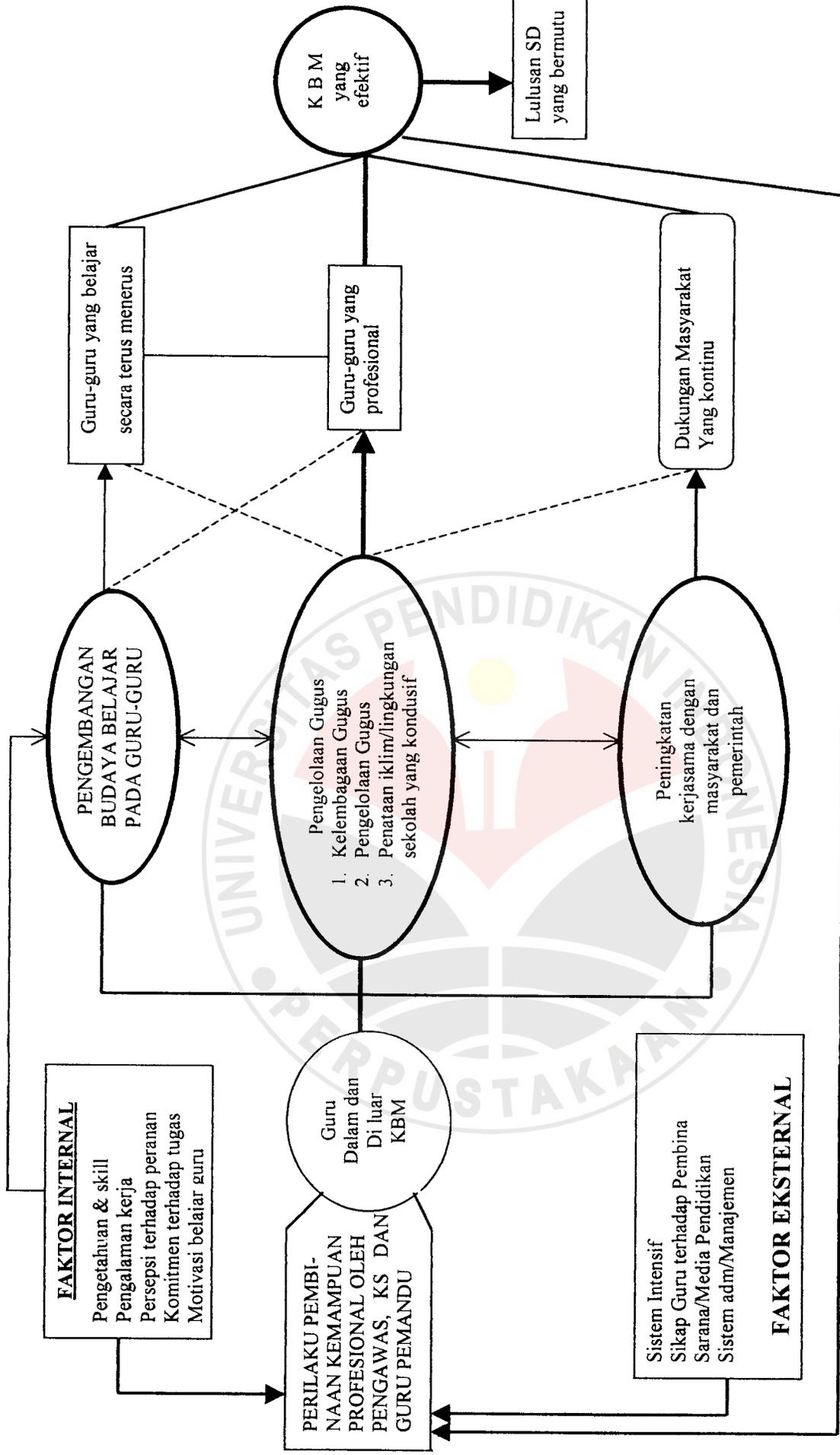
Dari pernyataan tersebut diatas bahwa pelaksanaan gugus melibatkan berbagai pihak, terutama mereka yang memiliki kebutuhan terhadap sekolah. Oleh karena itu pengelola pendidikan terutama para pengajar dituntut untuk memiliki komitmen yang tinggi untuk menyukseskan kegiatan gugus dan secara simultan selalu meningkatkan kemampuan profesional, terutama dalam memberikan

masukannya permasalahan pengajaran guru kelas termasuk mengaktifkan dan pendayagunaan fasilitas sekolah.

Dalam pelaksanaannya pembinaan profesional guru secara makro dapat dilihat sebagai salah satu fungsi dari manajemen pendidikan yang mengacu kepada penataan perilaku orang-orang dalam sistem pendidikan. Namun secara makro aktivitas tersebut merupakan sub sistem pendidikan itu sendiri.

Dalam sistem pendidikan dasar pembinaan secara formal merupakan tugas pengawas sekolah, sedangkan kepala sekolah berkewajiban melaksanakan pembinaan terhadap guru-guru.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat digambarkan paradigma penelitian yang merupakan kerangka berpikir untuk melaksanakan penelitian ini. Paradigma penelitian ini dikembangkan dengan mempergunakan pendekatan sistem, artinya aktivitas pembinaan profesional dipandang sebagai suatu sistem yang terdiri dari subsistem yang saling berkaitan dan menunjang satu sama lain. Paradigma yang dimaksud dapat digambarkan secara visual seperti tertera pada halaman berikut ini.



Gambar 2.

PARADIGMA PENELITIAN

